

Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

(Survey pada Pemerintah Daerah di Wilayah Bandung Raya)

The Effect of the Implementation of the Internal Control System of Government and Competencies of Human Resource to the Quality of Local Government Financial Reporting

¹Rahma Putri, ²Sri Fadilah, ³Nurhayati

^{1,2,3} Prodi Akuntansi, Fakultas ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹rahmaputri17@gmail.com, ²srifadilah71@yahoo.com, ³nurhayati_kanom@yahoo.com

Abstract. This study aims to determine the application of the internal control system of government, human resource competencies, the quality of local government financial reporting, and the effect of the implementation of the internal control system of government and human resource competencies to the local government financial reporting quality either simultaneously or partially. Test equipment used in this research is multiple linear regression analysis. For the purposes of the study, the research uses a quantitative method with a survey approach. Data collection techniques in the form of a questionnaire distributed to the parties involved in the preparation of the local government financial reports in the region Bandung Raya. The results showed that the government's implementation of internal control systems in the local government area of Bandung Raya generally been good, the competence of human resources in the local government area of Bandung Raya generally been good, financial reports of local governments in the area of Bandung Raya generally been qualified, and implementation of internal control systems of government and competence of human resources had a positive influence on the quality of local government financial reporting either simultaneously or partial.

Keywords: Internal control systems of government, the competence of human resources , the quality of local government financial statements

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (spip), kompetensi sumber daya manusia, kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah serta pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (spip) dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah baik secara simultan maupun parsial. Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Untuk kegunaan penelitian tersebut, penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survey. Teknik pengumpulan data berupa kuesioner yang disebarakan kepada pihak-pihak yang berperan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Bandung Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (spip) di pemerintah daerah wilayah Bandung Raya pada umumnya sudah baik, kompetensi sumber daya manusia di pemerintah daerah wilayah Bandung Raya pada umumnya sudah baik, laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah Bandung Raya pada umumnya sudah berkualitas, dan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (spip) dan kompetensi sumber daya manusia (sdm) memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah baik secara simultan maupun parsial.

Kata Kunci: Sistem pengendalian interen pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dengan adanya desentralisasi pengelolaan pemerintah di daerah dan tuntutan masyarakat akan transparansi serta akuntabilitas, memaksa pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel (Indra Bastian, 2010:5). Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang komprehensif.

Informasi akuntansi yang terkandung dalam suatu laporan keuangan harus memenuhi keempat unsur karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya akan mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Terdapat 4 (empat) opini yang diberikan pemeriksa, yaitu opini wajar tanpa pengecualian (WTP), opini wajar dengan pengecualian (WDP), opini tidak wajar (TW), dan tidak memberikan pendapat (TMP) (Dadang Suwanda, 2015:5).

Pada kenyataannya, terdapat beberapa fenomena mengenai permasalahan pelaporan keuangan, seperti yang disajikan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2015, yang dikutip dari www.bpk.co.id bahwa ada 35 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang terlambat disampaikan untuk diperiksa oleh BPK. Selanjutnya, Harry Azhar Aziz (Ketua BPK) juga mengungkapkan bahwa permasalahan pelaporan keuangan pemerintah daerah pada umumnya disebabkan karena para pejabat/pelaksana yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menyajikan laporan keuangan. Selain itu, karena para pejabat/pelaksana belum sepenuhnya memahami ketentuan yang berlaku, serta keterlambatan pemerintah daerah dalam mempersiapkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.

Disamping itu, hasil pemeriksaan BPK juga mengungkapkan permasalahan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Dari 504 LKPD tahun 2014 yang di periksa, terdapat 5.978 permasalahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang meliputi 2.222 kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.598 kelemahan sistem pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 1.158 kelemahan struktur pengendalian intern (www.bpk.go.id). Sumber daya manusia adalah faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya yang dimilikinya, melainkan kompetensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Dalam hal ini, kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan (Sinarwati, dkk, 2014). Soenaryo dan Siswanto (2012:2) mengungkapkan bahwa Kompetensi seseorang mengindikasikan cara berperilaku dan berpikir seseorang dalam berbagai situasi yang cukup konsisten untuk suatu periode waktu yang cukup panjang dan bukan hal yang kebetulan sesaat semata.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pasal 33 ayat (1) disebutkan bahwa untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan dan kinerja sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini, setiap entitas pelaporan dan akuntansi wajib menyelenggarakan sistem pengendalian intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Peraturan Pemerintah tersebut secara tegas telah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk membangun Sistem Pengendalian Intern (SPI) guna mencegah timbulnya kegagalan dan ketidakefisienan dalam pencapaian tujuan organisasi. (Suwanda dan Dailibas, 2013:2).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah baik secara simultan maupun parsial”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia (SDM) terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

B. Landasan Teori

Jan Hoesada (2016:181) mengungkapkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara konseptual mengadopsi *framework* sistem pengendalian intern yang dirilis tahun 1992 oleh *Committee of Sponsoring Organization “COSO framework”*. Dalam *framework* tersebut pengendalian intern didefinisikan sebagai

“Processes affected by an entity’s board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objective in the following categories: financial reporting reliability, operating efficiency and effectiveness, compliance with applicable laws and standards”.

Suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personel lain, dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam kategori berikut: keandalan pelaporan keuangan, efisiensi operasional dan efektivitas, kepatuhan terhadap hukum dan standar yang berlaku.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut mengacu pada unsur sistem pengendalian intern yang telah di praktikan di lingkungan pemerintah di berbagai Negara. Menurut Suwanda dan Dailibas (2013:6):

“Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari lima unsur, diantaranya yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian Risiko
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi
5. Pemantauan Pengendalian Intern”

Menurut Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Nomor 46A tahun 2003, kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. (bpk.go.id). Menurut Payman J. Simanjuntak dalam buku Amin Widjaja (1995:10) menjelaskan bahwa Human Resource dalam definisinya mengandung dua pengertian, yang pertama usaha kerja atau jasa yang dapat memberikan dalam produksi. Hal ini mencerminkan “kualitas” usaha yang diberikan seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa, serta yang kedua adalah manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Hal ini mencerminkan “kuantitas”, yaitu jumlah manusia yang bekerja pada perusahaan. Terdapat beberapa karakteristik kompetensi sumber daya manusia. Spencer and Spancer (1993) dalam Edy Sutrisno

(2012:206) yang mengemukakan bahwa

Karakteristik kompetensi terdiri dari lima aspek, yaitu:

1. *Motives* (Motivasi)
2. *Traits* (Watak)
3. *Self Concept* (Unsur Bawaan)
4. *Knowledge* (Pengetahuan)
5. *Skills* (Keterampilan)

Laporan keuangan dimaksudkan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan atau selama satu tahun anggaran. Menurut Drs. Jumingan, laporan keuangan didefinisikan sebagai hasil dari refleksi dari sekian banyak transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Laporan keuangan merupakan hasil tindakan pembuatan ringkasan data keuangan perusahaan yang disusun guna memberikan informasi kepada berbagai pihak (Jumingan, 2006:4). Pelaporan Keuangan lebih luas dari laporan keuangan. Pelaporan keuangan terdiri dari laporan keuangan, pengungkapan, informasi lengkap, dan alat-alat pelaporan keuangan lain. (Indra Bastian, 2005:97).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, untuk menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat bagi para pemakainya, maka informasi yang terdapat dalam laporan tersebut harus berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dari karakteristik kualitatif. Dalam peraturan pemerintah tersebut juga dikemukakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Suwanda (2015:68) menyatakan:

“Terdapat empat karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah. Keempat karakteristik tersebut meliputi:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami”.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berikut adalah penelitian mengenai pengaruh penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Uji Simultan (F)

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	761,828	2	380,914	22,190	,000 ^a
	Residual	669,465	39	17,166		
	Total	1431.293	41			

a. Predictors: (Constant), Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

b. Dependent Variable: Kualitas Pelaporan Keuangan

Sumber: Hasil olah SPSS 13, dengan tingkat signifikan 5%

Kriteria penerimaan atau penolakan H_0 pada uji simultan adalah dengan membandingkan F_{hitung} terhadap F_{tabel} dengan ketentuan sebagai berikut :

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak (signifikan)

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima (tidak signifikan)

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai F_{hitung} sebesar 22,190 dengan p -value (sig) 0,000. Dengan $\alpha=0,05$ serta derajat kebebasan $v_1 = 39$ ($n-(k+1)$) dan $v_2 = 2$, maka di dapat $F_{tabel}=3,238$.

Dikarenakan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($22,190 > 3,238$) maka H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.

Selanjutnya, pada pengujian koefisien regresi secara parsial akan diuji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Statistik uji yang digunakan pada pengujian parsial adalah uji t. Dengan menggunakan program SPSS 13 diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji-t

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	4,666	3,538		,195
	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	,292	,094	,474	,004
	Kompetensi SDM	,231	,112	,315	,046

a. Dependent Variable: Kualitas Pelaporan Keuangan

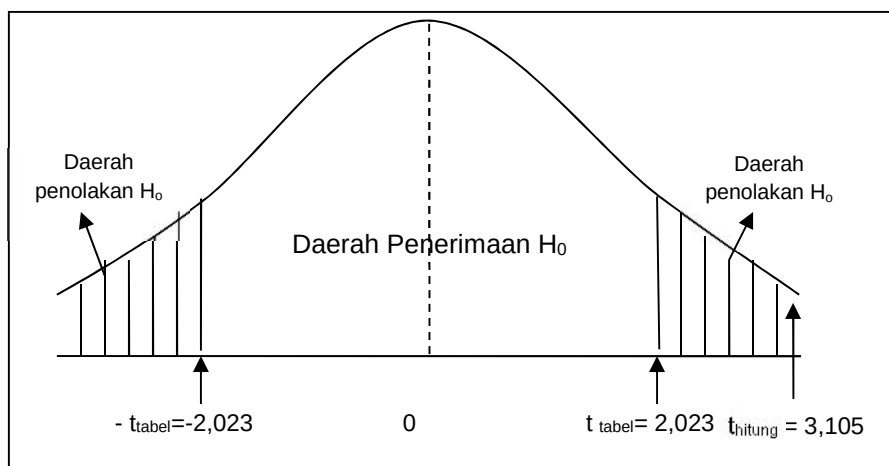
Sumber: Hasil olah SPSS 13

Pengujian hipotesis variabel X_1 (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)

H_0 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.

H_1 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.

Tingkat signifikan (α) sebesar 5%, dan derajat kebebasan (v) = 39 ($n-(k+1)$) dan $v_2 = 2$ didapat nilai t_{tabel} 2,023.



Gambar 1. Kurva Uji-t

Dari hasil SPSS diatas diperoleh nilai t_{hitung} untuk X_1 sebesar 3,105 dan t_{tabel} 2,023. Dikarenakan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak, artinya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.

Hasil penelitian ini didukung oleh Undang-Undang No.1 Tahun 2004 pasal 58 ayat (1) dan (2) tentang pembendaharaan Negara yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

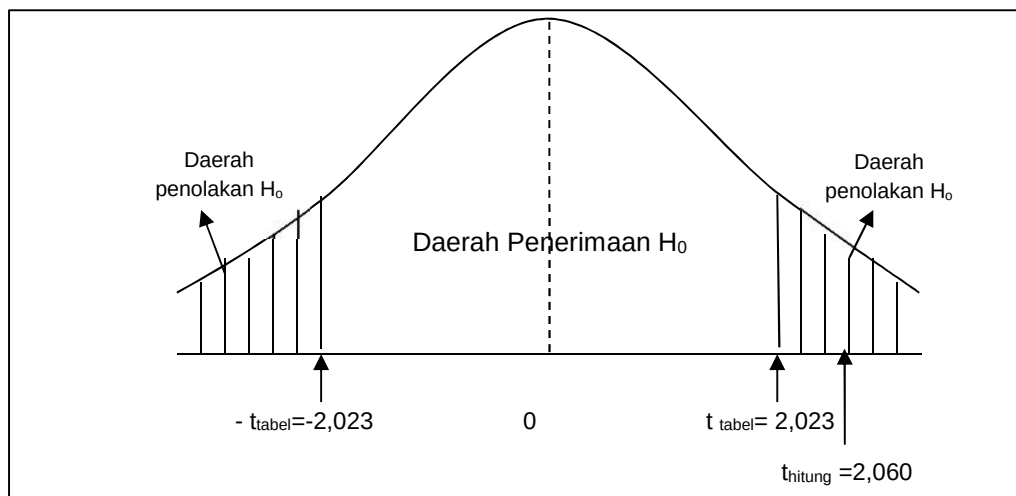
Negara, presiden selaku kepala pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern tersebut yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pakaya, dkk (2014) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah.

Pengujian hipotesis variabel X₂ (Kompetensi Sumber Daya Manusia)

H_0 : Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.

H_1 : Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.

Tingkat signifikan (α) sebesar 5%, dan derajat kebebasan (v) = 39 ($n-(k+1)$) dan $v_2=2$ didapat nilai t_{tabel} 2,023.



Gambar 2. Kurva Uji-t

Dari hasil SPSS diatas diperoleh nilai t_{hitung} untuk X₂ sebesar 2,060 dan t_{tabel} 2,023. Dikarenakan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak, artinya Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.

Hasil penelitian ini didukung oleh Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Nomor 46A tahun 2003, yang menyatakan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil, sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi dapat menentukan profesionalitas seseorang dalam bekerja, keefektifan dan keefisienan seseorang dalam menyelesaikan tugasnya. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Roviyantie (2011) yang menyatakan bahwa secara parsial Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Artinya bahwa semakin kompeten SDM pembuat laporan keuangan, maka semakin baik pula Kualitas Laporan Keuangan Daerah yang dihasilkan.

D. Kesimpulan

Dari hasil analisa dan pengolahan data pada penelitian tentang “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah”, Kesimpulan yang ditarik penulis sebagai berikut :

1. Sistem pengendalian intern pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

2. Kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

E. Saran

Penulis menyadari banyaknya keterbatasan dalam penelitian ini baik dari ruang lingkup penelitian yang hanya dilakukan pada Pemerintah Daerah Wilayah Bandung, serta masih terbatasnya variabel yang diteliti, Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa masukan yang perlu diperhatikan:

1. penelitian selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakan dan memperkuat hasil penelitian ini dengan memperluas area penelitian, menambah variabel penelitian seperti gaya kepemimpinan, penerapan standar akuntansi pemerintahan, penggunaan teknologi informasi, serta kapasitas auditor. Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti pengaruh dari variabel-variabel lain yang belum termasuk dalam penelitian ini.
2. Pemerintah daerah harus lebih menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah mengingat telah dikeluarkannya PP No. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah pasal 33 ayat (1) yang mewajibkan setiap entitas pelaporan untuk menyelenggarakan sistem pengendalian intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah daerah juga harus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan penatausahaan laporan keuangan.

Daftar Pustaka

- Bastian, Indra. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga
- Dailibas dan Suwanda, D.2013. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta: Penerbit PPM
- Hoesada, Jan. 2016. Bunga Rampai Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK tahun 2015 dalam <http://www.bpk.go.id/ihps#> diunduh tanggal 10 April 2016
- Jumingan. 2006. Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Bumi Aksara
- Pakaya, dkk. Pengaruh Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Studi Kasus pada DPPKAD Kabupaten Gorontalo Utara)
- Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dalam <http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-8-tahun-2006-tentang-pelaporan-keuangan-dan-kinerja-instansi-pemerintah/PP82006LAKIP.pdf>
- Roviyantie, Devi. 2011. Pengaruh Kompetensi SDM dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survey pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tasikmalaya). Universitas Siliwangi
- Sutrisno, Edy. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana
- Suwanda, Dadang. 2015. Sistem Akuntansi AkruaI Pemerintah Daerah. Jakarta: PPM

Tunggal, Amin Widjaja. 1995. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: PT Rineka Cipta

UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam http://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2013/12/file_storage_1386161111.pdf diunduh tanggal 2 Mei 2016

UU No. 22 tahun 1999 dalam <http://www.esdm.go.id/prokum/uu/1999/uu-22-1999.pdf> diunduh tanggal 2 Mei 2016

www.bpk.go.id